



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 100.3/590 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/29  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI TAHUN 2025**

**BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan produk hukum daerah khususnya Peraturan Bupati dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terbaru, Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3/318 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3/318 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor

100.3/29 Tahun 2025 tentang Penetapan Program  
Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/29 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
TAHUN 2025.

Pasal I

Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2025 tentang  
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun  
2025 sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Keputusan Bupati Nomor 100.3/180 Tahun 2025 tentang  
Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun  
2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan  
Bupati Tahun 2025;
- b. Keputusan Bupati Nomor 100.3/269 Tahun 2025 tentang  
Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29  
Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan  
Peraturan Bupati Tahun 2025; dan
- c. Keputusan Bupati Nomor 100.3/318 Tahun 2025 tentang  
Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29  
Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan  
Peraturan Bupati Tahun 2025,  
pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Oktober 2025  
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:

1. Inspektur Daerah; dan
2. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 100.3/590 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/29  
 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 BUPATI TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

No	Tentang	Materi Pokok	Perangkat Daerah
1.	Tata Kelola Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi	Pengaturan standar tiang telekomunikasi dan kabel jaringan telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Turunan Perda Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan Pasal Pasal 14 ayat (11), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 35 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (7), dan Pasal 43 ayat (6)	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif	Menghapus Izin Operasional Menara Telekomunikasi dan mengubah Rekomendasi Titik Lokasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	<i>Masterplan Smart City</i>	Rencana pembangunan <i>Smart City</i> Karanganyar, yang meliputi <i>Smart Government, Smart Economy, Smart Branding, Smart Living, Smart Society,</i> dan <i>Smart Environment</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Pendanaan LPPL Swiba	Keistimewaan LPPL Swiba tentang pendanaan LPPL Swiba yang bersumber dari dana Hibah	Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	Melakukan penyesuaian atas diundangkannya Permendagri 8 Tahun 2023 Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar Pada Situasi Darurat Bencana	Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dan bantuan kebutuhan dasar pada situasi darurat bencana	BPBD

8.	Standar Harga Tahun Anggaran 2026	Memuat SSH, SBU, ASB dan HSPK	Badan Keuangan Daerah
9.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah
10.	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Menentukan Besaran Pajak Air Tanah	Badan Keuangan Daerah
11.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2025	Badan Keuangan Daerah
12.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan Daerah
13.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan Daerah
14.	Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025	Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan Daerah TA.2025	Badan Keuangan Daerah
15.	Peraturan Bupati Transaksi Non Tunai Tahun 2025	Peraturan Bupati Transaksi Non Tunai Tahun 2025	Badan Keuangan Daerah
16.	Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah)	Badan Keuangan Daerah
17.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Berisi Rincian Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan Daerah
18.	Pedoman Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral	a. Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran c. Sinergi Pemungutan d. Rekonsiliasi Pajak	Badan Keuangan Daerah



	Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
19.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Pedoman pemberian meliputi pembayaran dan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas	Badan Keuangan Daerah
20.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Berasal dari Eks Tanah Kas Desa yang Status Desanya menjadi Kelurahan	Pedoman sewa tanah eks tanah kas desa	Badan Keuangan Daerah
21.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pedoman pemanfaatan barang milik daerah	Badan Keuangan Daerah
22.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Merubah besaran penghasilan yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah	Badan Keuangan Daerah
23.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha</li> <li>b. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha</li> <li>c. Pengelolaan pengaduan</li> <li>d. Penyelenggaraan pengawasan</li> <li>e. Tata cara pengenaan sanksi administratif</li> </ul>	DPMPTSP
24.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, Perizinan Non berusaha, dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perubahan penyesuaian sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan	DPMPTSP

25.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame	Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame	DPMPSTSP
26.	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengaturan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Disdagperinaker
27.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Diskuktrans ESDM
28.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pedoman penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan	Diskuktrans ESDM
29.	Perpustakaan Umum Kabupaten Karanganyar	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi pengurusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar memenuhi standar nasional perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
30.	Program Arsip Vital	Revisi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Arsip Vital dalam hal penambahan Tim Pengelola Arsip Vital dan penjelasan penyimpanan secara <i>on site</i> dan <i>of site</i> .	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31.	Pengorganisasian Kearsipan	Unit Kearsipan, Lembaga Kearsipan Daerah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pendanaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
32.	Arsip Terjaga	Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
33.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Mengatur tentang pemberian remunerasi pada BLUD UPT Puskesmas	Dinas Kesehatan

34.	Tata Cara Pemungutan Retribusi pada UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Tata cara pemungutan retribusi pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
35.	Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non-ASN pada BLUD UPT Puskesmas	Mengatur tentang pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Non-ASN pada BLUD UPT Puskesmas	Dinas Kesehatan
36.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan Pasal 6 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 27 pada Perda Nomor 11 Tahun 2019	Dinas Kesehatan
37.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar	Perubahan aturan tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Kartini
38.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 tentang Remunerasi BLUD RSUD	Perubahan aturan tentang Remunerasi yang diterapkan di BLUD RSUD	RSUD Kartini
39.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Perubahan aturan tentang Pelaksanaan Kerjasama di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Kartini
40.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Perubahan aturan Pola Tata Kelola BLUD RSUD disesuaikan dengan kondisi di Rumah Sakit	RSUD Kartini
41.	Pengelolaan Barang BLUD RSUD	Aturan tentang pengelolaan barang yang bersumber dari anggaran BLUD RSUD	RSUD Kartini
42.	Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD	Aturan terkait pelaksanaan anggaran di BLUD RSUD	RSUD Kartini

43.	Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Pedoman tata cara pemungutan retribusi pada BLUD RSUD	RSUD Kartini
44.	Perubahan Tarif Retribusi Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Perubahan rincian tarif retribusi layanan kesehatan pada RSUD Kartini	RSUD Kartini
45.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah	Perubahan atas ketentuan dalam penyesuaian administrasi dan penggunaan logo RSUD Kartini Karanganyar	RSUD Kartini
46.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Perubahan aturan terkait pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Non ASN BLUD RSUD	RSUD Kartini
47.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Perubahan aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD	RSUD Kartini
48.	Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Rangka Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Karanganyar	Petunjuk teknis pemberian hibah kepada karang taruna	Dinas Sosial
49.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ruang Lingkup: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. pengawasan; h. sistem informasi; i. perlindungan dan pemberdayaan petani;	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan



		j. pembiayaan; dan k. peran serta Masyarakat	
50.	Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun	Pengaturan mengenai pengesahan pertelaan, penerbitan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS), persyaratan pengesahan, akta pemisahan rumah susun	DPUPR
51.	Pedoman Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pengaturan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi perizinan PBG/SLF, ketentuan pengawasan bangunan gedung, klasifikasi bangunan gedung	DPUPR
52.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Colomadu	Pengaturan mengenai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan penataan ruang, pengaturan zonasi dan kelembagaan pengawasan pola ruang di Kecamatan Colomadu	DPUPR
53.	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DPUPR
54.	Pedoman Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pedoman pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka menertibkan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Karanganyar	DPUPR
55.	Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2045	Aturan mengenai rencana induk sistem pengolahan air limbah domestik tahun 2025-2045	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
56.	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
57.	Rencana Aksi Daerah <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGS) Kabupaten	Rencana Aksi Daerah <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGS) Kabupaten	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan

	Karanganyar Tahun 2025 - 2029	Karanganyar Tahun 2025 - 2029	
58.	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karanganyar	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karanganyar	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
59.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
60.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
61.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
62.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
63.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
64.	Rencana Strategis Daerah Tahun 2025-2029	Rencana Strategis Daerah Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
65.	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Pedoman pengelolaan kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	BKPSDM
66.	Aparatur Sipil Negara Berprestasi	Penilaian Aparatur Sipil Negara berprestasi menjadi 4 kategori, yakni: a. Jabatan Pelaksana b. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan c. Jabatan Fungsional Guru d. Jabatan Fungsional lainnya	BKPSDM
67.	Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil	a. Talenta bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Talenta bagi Jabatan Administrasi; dan c. Talenta bagi Jabatan Fungsional.	BKPSDM
68.	Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	a. Mutasi Oleh Pemerintah Daerah b. Mutasi atas permintaan sendiri	BKPSDM

69.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara guna meningkatkan produktivitas pelayanan	Bagian Organisasi Setda
70.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Penyeragaman dan penyesuaian tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (mencabut Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2012)	Bagian Organisasi Setda
71.	Penetapan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ASN pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana sesuai Permenpan Nomor 45 Tahun 2022 dan Kepmenpan Nomor 11 Tahun 2024	Bagian Organisasi Setda
72.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Mengubah ketentuan mengenai pembayaran pajak dibebankan kepada Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Setda
73.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Penyesuaian terhadap kriteria pemberian TPP: a. beban kerja; b. prestasi kerja; c. kondisi kerja; d. kelangkaan profesi; dan e. pertimbangan objektif lainnya.	Bagian Organisasi Setda
74.	Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyesuaian perubahan struktur, organisasi dan tata kerja sebagai tindak lanjut Perda Perubahan Struktur Organisasi Bapperida dan BPBD	Bagian Organisasi Setda
75.	Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Inovasi Daerah	Penyesuaian perubahan struktur, organisasi dan tata kerja, mencabut Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut Perda Perubahan Struktur Organisasi Bapperida dan BPBD)	Bagian Organisasi Setda
76.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah	Penyesuaian uraian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada BPBD dan Bapperida Kabupaten Karanganyar	Bagian Organisasi Setda

77.	Uraian Tugas Jabatan pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyesuaian terhadap uraian tugas jabatan pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bagian Organisasi Setda
78.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Penyesuaian nomenklatur Bapperida dan BPBD	Bagian Organisasi Setda
79.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perubahan jumlah UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi yang semula 17 menjadi 5	Bagian Organisasi Setda
80.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar Kelas C	Penyesuaian terhadap perubahan nama RSUD Kartini dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kartini	Bagian Organisasi Setda
81.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa	a. Perubahan masa jabatan kepala desa b. Perubahan persyaratan kepala desa	Dispermades
82.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa	a. Perubahan persyaratan calon perangkat desa b. Perubahan hak perangkat desa	Dispermades
83.	Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa	a. Perubahan ketentuan pembentukan komposisi anggota BPD b. Perubahan masa kerja anggota BPD c. Perubahan hak anggota BPD	Dispermades
84.	Pedoman Penyusunan APBDesa TA. 2026	a. Petunjuk teknis dan kebijakan penyusunan b. APBDesa TA. 2026	Dispermades
85.	Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa/ BUMDesa Bersama	a. Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BUM b. Desa/BUMDesa Bersama	Dispermades

86.	Penetapan Batas Desa	Penetapan batas-batas Desa se-Kabupaten Karanganyar	Dispermades
87.	Perubahan Perbup No. 23 Tahun 2023 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Perubahan mekanisme pengajuan proposal kegiatan	Dispermades
88.	Tata Cara Pengelolaan Aset Desa	Petunjuk pelaksanaan pengelolaan aset desa	Dispermades
89.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. Ketentuan pemberian honor/penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa (PPKD, PKPKD, THR) b. Penambahan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan c. Penghapusan ketentuan tentang penghasilan perangkat desa yang berstatus PNS	Dispermades
90.	Standar Satuan Harga Desa Tahun 2025	Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025	Dispermades
91.	Perubahan Perbup Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Perubahan ketentuan dalam Lampiran menyesuaikan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Dispermades
92.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan teknis Perda Perhubungan	Dinas Perhubungan
93.	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Kabupaten Karanganyar	Petunjuk dan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Karanganyar	Dinas Lingkungan Hidup
94.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	a. Pengendalian kuantitas penduduk b. Peningkatan kualitas penduduk c. Pengarahan mobilitas penduduk d. Pembangunan keluarga e. Pengembangan kependudukan f. Penataan laju pertumbuhan penduduk g. Penataan persebaran penduduk	DP3APPKB

		h. Penataan administrasi kependudukan	
95.	Rencana Aksi Daerah Kepemudaan	Berisi dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan pemuda di Kabupaten Karanganyar	Disparpora
96.	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi Bagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perubahan Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Transportasi Bagian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebabkan oleh kenaikan harga properti dan kenaikan harga sewa kendaraan bermotor	Sekretariat DPRD
97.	Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2017 tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar	Sekretariat DPRD
98.	Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Pedoman teknis pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Bagian Hukum Setda
99.	Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum Setda
100.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Memperbarui pengaturan terkait Lembaga kemasyarakatan di kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Bagian Pemerintahan Setda
101.	Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji dan Penjaga Tempat Ibadah di Kabupaten Karanganyar	Pedoman pelaksanaan program pemberian insentif kepada guru ngaji dan penjaga tempat ibadah	Bagian Kesra Setda
102.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kode Etik di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa	Menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kode Etik Di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda



103	Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Desa dan Kelurahan	Pedoman pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat desa dan kelurahan	Disdukcapil
104	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
105	Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar, Komunitas Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Penguatan Literasi dan Numerasi Tahun 2025	Pedoman dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
106	Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Strategi pengendalian, dan membentuk satuan tugas pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Inspektorat Daerah
107	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Merubah ketentuan mengenai pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah sebagai bagian dari pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah	Inspektorat Daerah

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

